

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
KATA PENGANTAR	3
Ringkasan Eksekutif	4
BAB 1 Pendahuluan	6
1.1 Struktur Organisasi	8
1.2 Tugas Dan Fungsi.....	11
1.3 Keadaan Pegawai	19
1.3.1 Kondisi Riil Pegawai Berdasar Jabatan.....	19
1.3.2 Kondisi Riil Pegawai Berdasar Pendidikan	21
1.3.3. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Beban Kerja	22
1.4 sarana dan prasarana	23
1.5 Keuangan.....	23
1.6 Sistematika Penyajian.....	24
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	26
2.1 Rencana Strategis	26
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah kabupaten Banjar.....	26
2.1.2 Tujuan Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian kabupaten banjar.....	27
2.1.3 Sasaran Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian kabupaten banjar.....	28
2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfo,Statistik Dan Persandian kabupaten Banjar.....	29
2.2 Rencana Kerja Tahunan	30
2.3 Penetapan Kinerja / Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	30
2.4 Rencana Anggaran Tahun 2018.....	32
2.4.1 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis.	33
BAB III AKuntabilitas Kinerja	34
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	34

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja sasaran Strategis	37
2.1 Sasaran Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi Dan Informatika	37
2.2 Sasaran Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Yang Berkualitas	38
3. AKuntabilitas Keuangan	42
Analisa Efisiensi	43
3.1 Tindak Lanjut Atas Evaluasi Laporan Kinerja Tahun (2017).....	44
BAB IV Penutup.....	46
1. Kesimpulan.....	46
2. Saran-saran.....	46
Lampiran	47

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2018 Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tahun 2018. LKjIP Tahun 2018 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Capaian kinerja tahun 2018 yang tertuang dalam Laporan Kinerja merupakan cerminan kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian.



Didalam Laporan Kinerja ini mengacu pada RPJMD dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. Dalam penyusunan laporan kinerja ini masih banyak terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data dan diharapkan dapat digunakan sebagai arah serta pedoman dan perbaikan kinerja selanjutnya.

Semoga laporan kinerja ini dapat bermamfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Martapura, Januari 2019
Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik
dan Persandian
Kabupaten Banjar,

Dr. Ir. H. M. FARID SOUFIAN, MS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19601218 198602 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2018 merupakan tahun dimana Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi dan Informasi.

Dalam memberikan pelayanan yang baik di Bidang Komunikasi dan Informasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu tujuan pertama Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur, dan tujuan kedua Meningkatnya tata kelola Pemerintahan. Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar mengacu pada prioritas program, aspirasi dan mengikutsertakan masyarakat untuk mendukung strategi pembangunan masyarakat Kabupaten Banjar.

Sesuai APBD tahun anggaran 2018 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar mengelola anggaran belanja sebesar Rp 16,874,456,976,- (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 2.844.166.076,- (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan Belanja Langsung Utama Rp 11.814.745.200,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), Belanja Langsung Pendukung Rp 2.215.545.700,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi belanja langsung sebesar Rp 13.393.612.800,- dan belanja tak langsung sebesar 2,659,832,785,- dengan Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2018 adalah realisasi fisik sebesar 95,46 %.

Dari sisi akuntabilitas kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan dua sasaran strategis, yaitu :

1. Sasaran (1) : Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika. Sasaran ini memiliki indikator Kinerja Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler dengan Realisasi kinerja sebesar 92 %, hal ini melampaui dari target yang ingin dicapai sebesar 76.34 % sehingga capaian yang diperoleh sebesar 120.51 %. Capaian tahun 2018 mengalami kenaikan 7.36 % dari tahun 2017 sebesar 113.15 %, ini berarti termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Ditahun 2018 ini sasaran pertama ini realisasi anggaran sebesar 98.48 % sehingga memiliki efisiensi anggaran sebesar 1.52 %

2. Sasaran (2) : Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Yang Berkualitas. Sasaran ini memiliki dua indikator kinerja :
 1. Persentase Pengguna Website Domain dan Subdomain SKPD, jika dibandingkan dengan tahun 2017 capaian indikator mengalami kenaikan 3,69 % yakni dari 121.31 % menjadi 125,00 % ditahun 2018 ini. capaian ini didapat dari target yang ditentukan sebesar 80 % terealisasi sebesar 100 %, ini berarti termasuk dalam kriteria sangat tinggi.
 2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti Melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi, untuk tahun 2018 ini capaian kinerja 2018 masih sama dengan tahun 2017 yang lalu dikisaran 100 %, dari target yang tentukan 100 % terealisasi 100 % ini berarti juga termasuk dalam kriteria sangat tinggi.

Secara keseluruhan realisasi keuangan untuk sasaran sebesar 94.57 % sehingga memiliki efesiensi anggaran sebesar 5.43 %.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjar dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 3 indikator kinerja berada di interval $91 \leq 100$ atau sangat tinggi. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugasannya masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan kekurangan sumber daya manusia dan kemajuan teknologi yang cepat. LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

BAB I PENDAHULUAN

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pada penyelenggaraan pemerintahan, agar program dan kegiatan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dapat menuntaskan permasalahan yang ada di masyarakat, diperlukan sarana penyampaian informasi dari masyarakat yang selanjutnya diolah, dan pada akhirnya menjadi kebijakan dan informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Adapun Proses tersebut diperankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dan akan terasa cepat tepat, apabila memanfaatkan mekanisme komunikasi dengan informatika, yakni dengan menggabungkan antara informasi, komunikasi dan telematika. Dengan kata lain, informasi dan komunikasi yang berbasis teknologi (*information of technology*).

Pembentukan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Banjar nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. Melalui Peraturan Daerah dimaksud, diharapkan terjadi penguatan kelembagaan dalam bidang informatika sejalan dengan tujuan pemerintah saat ini yang mengedepankan penggunaan teknologi (elektronik) dalam menunjang kinerja pelayanan birokrasi, disamping tugas pokoknya sebagai lembaga yang menangani komunikasi. Hal ini sangat terkait bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan

penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu, dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance*, salah satu upaya yang dilakukan adalah menggunakan teknologi informasi & komunikasi atau yang populer disebut *e- Government*.

E-Government didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kualitas pelayanan publik yang dilakukan dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2018. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pemerintah dengan melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kab. Banjar dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kab. Banjar Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kab. Banjar Tahun 2018 antara lain:

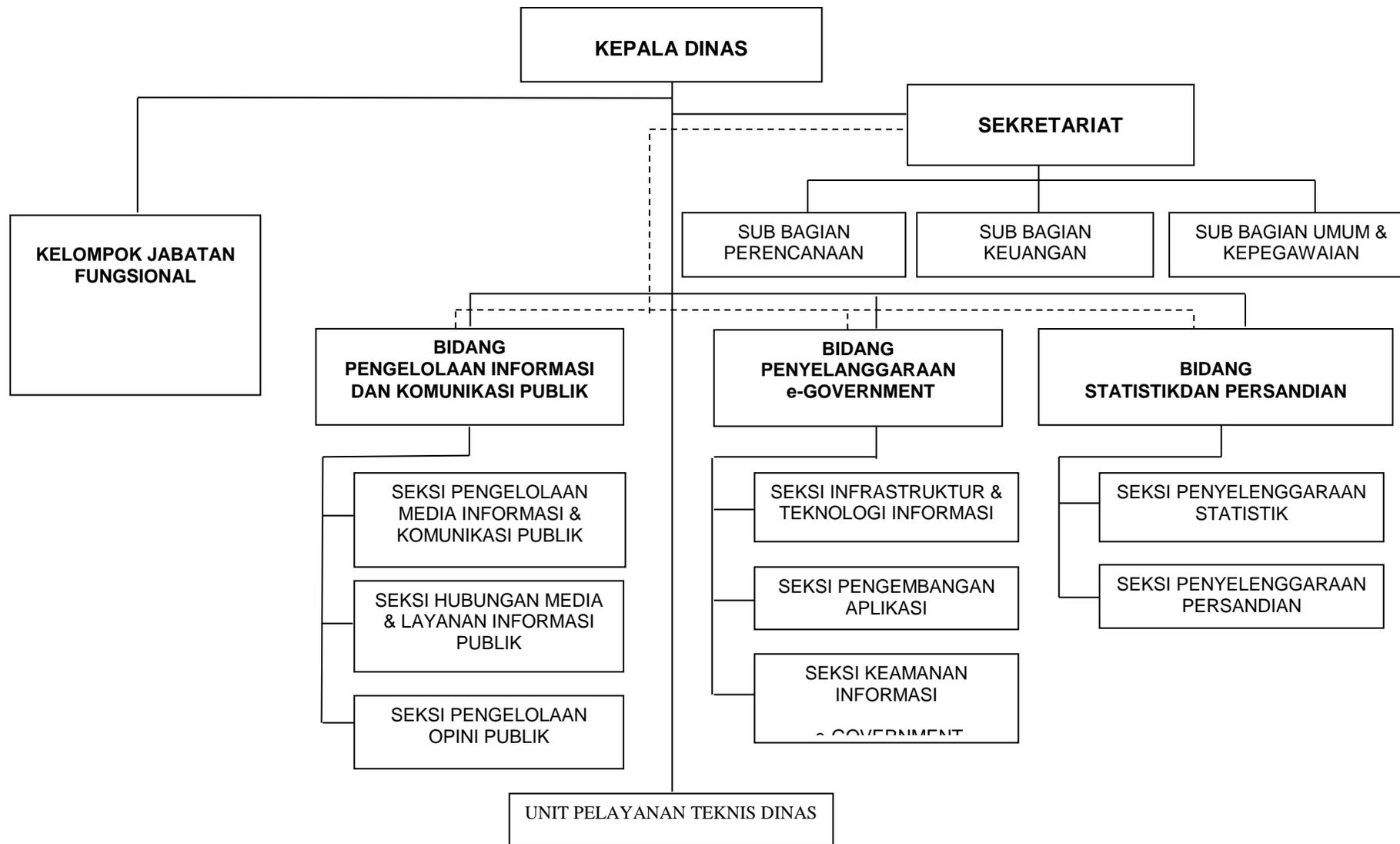
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar;
2. Mendorong Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas kominfo, Statistik dan Persandian kab. Banjar di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintah bidang Statistik dan urusan pemerintah bidang Persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Mengenai Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang antara lain menyatakan terdiri dari :

1. **Sekretariat**, yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Program.
2. **Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik serta bidang Pengelolaan Opini Publik.
3. **Bidang Penyelenggaraan E-Government**, mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Penyelenggaraan e-Government.
4. **Bidang Statistik dan Persandian** mempunyai tugas: mengkoordinasikan, merumuskan dan mengatur dan , mengenali tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidnag Statistik dan Persandian.



1.2 TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang Komunikasi dan Informasi, maka DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informasi;
- d. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informasi;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Komunikasi dan Informasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

SEKRETARIAT,

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan administratif, dipimpin oleh Sekretaris.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;
- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;
- c. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan program dan laporan;

- f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;

Sekretariat membawahi :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan tugas memberikan pelayanan administratif urusan umum dan urusan kepegawaian.

Fungsi :

- a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai;
- d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;
- e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian ;
- f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

Sub Bagian Program dan Laporan, dengan tugas pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan, penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi program dan laporan.

Fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
- b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
- c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
- d. Pengelolaan, Inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
- e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;

- g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan proyek;
- h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;
- i. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan, dengan tugas memberikan pelayanan administrasi keuangan

Fungsi :

- a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
- b. Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja;
- d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik serta bidang Pengelolaan Opini Publik.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik serta bidang Pengelolaan Opini Publik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik serta bidang Pengelolaan Opini Publik;
- c. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik serta bidang Pengelolaan Opini Publik;
- d. Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan laporan kegiatan bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik serta bidang Pengelolaan Opini Publik;
- e. Penyelenggaraan teknis urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik serta Pengelolaan Opini Publik;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :

Seksi Pengelolaan Opini Publik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Informasi pada bagian Pengumpulan dan Administrasi Data.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan pelayanan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;
- d. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Seksi Pengelolaan Media Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Informasi pada bagian pengumpulan dan administrasi data.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan media informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional maupun kabupaten;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengelolaan media informasi dan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional maupun kabupaten;
- c. Melaksanakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media informasi dan komunikasi publik;
- d. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan media informasi dan komunikasi publik; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya

Seksi Hubungan Media dan Layanan Informasi Publik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Data dan Informasi pada bagian Dokumentasi dan Informasi :

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang hubungan media informasi dan layanan informasi publik;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang hubungan media informasi dan layanan informasi publik;
- c. Melaksanakan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan dengan media;
- d. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pelayanan informasi publik dan layanan hubungan dengan media; dan

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Bidang Penyelenggaraan E-Government, mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pemngaturan dan perumusan bidang Penyelenggaraan e-Government.

Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi, bidang Pengembangan Aplikasi serta bidang Keamanan Informasi e-Government;
- b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi, bidang Pengembangan Aplikasi serta bidang Keamanan Informasi e-Government;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi, bidang Pengembangan Aplikasi serta bidang Keamanan Informasi e-Government;
- d. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan laporan kegiatan bidang Infrastruktur dan Teknologi Informasi, bidang Pengembangan Aplikasi serta bidang Keamanan Informasi e-Government;
- e. penyelenggaraan teknis urusan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, Pengembangan Aplikasi serta Keamanan Informasi e-Government;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahi :

Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Diseminasi Informasi pada bagian layanan informasi publik.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang infrastruktur dan teknologi informasi;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang infrastruktur jdan teknologi informasi;

- c. Melaksanakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK pemerintah daerah;
- d. Melaksanakan layanan Akses Internet dan Intranet pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City;
- f. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penggunaan infrastruktur dan teknologi informasi;
- g. Melaksanakan peningkatan SDM di bidang teknologi informasi; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Diseminasi Informasi pada bagian Media Interaktif.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan aplikasi program;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengembangan aplikasi program;
- c. Melaksanakan pengelolaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi program yang bersifat Generik, Spesifik dan Suplemen yang terintegrasi;
- d. Melaksanakan pengelolaan layanan domain dan sub domain lembaga dan pelayanan publik untuk kegiatan pemerintah daerah;
- e. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengembangan aplikasi; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Seksi Keamanan Informasi E-Government, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang Diseminasi Informasi pada bagian Media Informasi.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang keamanan informasi e-Government;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang keamanan informasi e-Government;
- c. Melaksanakan layanan keamanan informasi e-Government;
- d. Melaksanakan layanan system komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten;

- e. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundangan-undangan tentang keamanan informasi e-Government; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas: mengkoordinasikan, merumuskan dan mengatur dan ,mengenalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan dan perumusan bidnag Statistik dan Persandian.

Bidang Statistik dan Persandian

mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan program di bidang Penyelenggaraan Statistik dan bidang Penyelenggaraan Persandian;
- b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang Penyelenggaraan Statistik dan bidang Penyelenggaraan Persandian;
- c. perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan di bidang Penyelenggaraan Statistik dan bidang Penyelenggaraan Persandian;
- d. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan laporan kegiatan bidang Penyelenggaraan Statistik dan bidang Penyelenggaraan Persandian;
- e. penyelenggaraan teknis urusan Penyelenggaraan Statistik dan Penyelenggaraan Persandian;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Statistik dan Persandian

membawahi :

Seksi Penyelenggaraan Statistik, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Jaringan Komunikasi pada bagian Komunikasi Sosial.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral;
- c. Melaksanakan pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral;

- d. Melaksanakan konsultasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan data, penelitian dan pengembangan statistik sektoral; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Seksi Penyelenggaraan Persandian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Jaringan Komunikasi pada bagian Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi.

Fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan persandian;
- b. Melaksanakan petunjuk teknis dibidang penyelenggaraan persandian;
- c. Melaksanakan layanan pelaporan persandian kepada Bupati;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

1.3 KEADAAN PEGAWAI

1.3.1 KONDISI RIIL PEGAWAI BERDASAR JABATAN

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, begitu pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya.

Sumber Daya manusia (SDM) di DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kabupaten Banjar sampai dengan 31 Desember 2018, tercatat sebanyak 28 orang yang terdiri dari 15 orang pejabat struktural, 4 orang pejabat fungsional tertentu, dan 9 orang fungsional umum. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pejabat struktural

Pejabat struktural di DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kab Banjar Eselon II terdiri dari 1 orang laki-laki, Eselon III terdiri dari 3 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 7 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan

kebijakan di DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kab. Banjar. Jumlah pejabat struktural di DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kab. Banjar dijelaskan pada Gambar 1. berikut: Sumber : DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kab. Banjar.

Gambar 1. Grafik Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan jenis Kelamin



b. Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum

Tabel 1.1

Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kab. Banjar Tahun 2018

Nama Jabatan Staf	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Fungsional Pranata Komputer	2	2	4
Fungsional Umum	5	4	9
Total	7	6	13

c. Tenaga kontrak waktu tertentu

Selain pegawai yang berstatus PNS, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN di dukung oleh tenaga kontrak waktu tertentu, tercatat sebanyak 45 orang dengan rincian 1 orang pertugas kebersihan, 1 orang Sopir dan 43 orang dengan latar belakang pendidikan yang disesuaikan

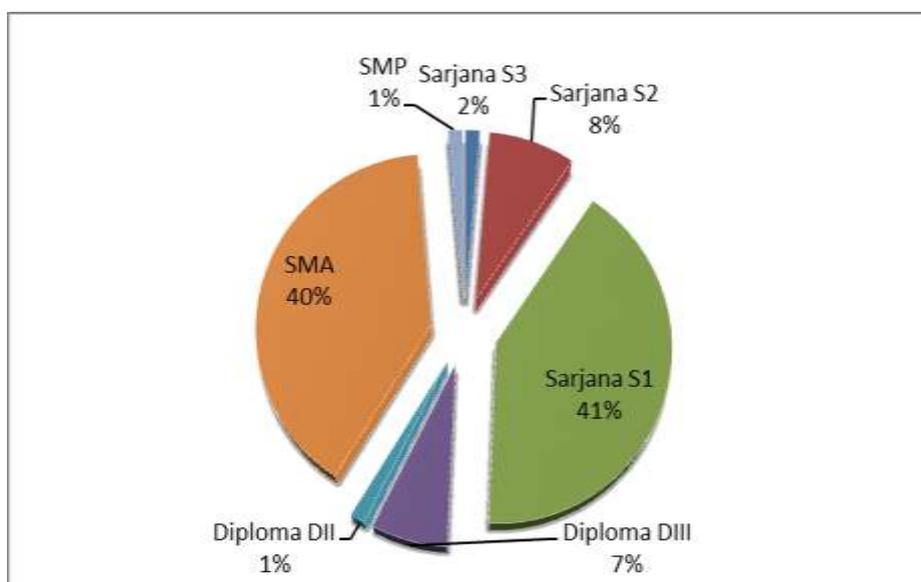
dengan keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung berjalannya Kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik , Bidang Penyelenggaraan E- Government, Pelaksana Penyelenggaraan Statistik Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian.

I.3.2 KONDISI RIIL PEGAWAI BERDASAR PENDIDIKAN

Tabel 1.2
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018

No.	Klasifikasi Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana S3	1
2	Sarjana S2	6
3	Sarjana S1	30
4	Diploma DIII	5
5	Diploma DII	1
7	SMA	29
8	SMP	1
9	SD	0
	Total	73

KOMPOSISI PEGAWAI DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN BERDASAR TINGKAT PENDIDIKAN



Dari gambar tersebut diatas dapat terlihat bahwa kondisi pegawai DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kab. Banjar sebagian besar diisi oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan S-1 (30 orang atau 41%) kemudian kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 2 %, kualifikasi

pendidikan DIII sebanyak 5 orang atau 7 % , kualifikasi pendidikan DII sebanyak 1 orang atau 1 % dan SLTA sebanyak 29 orang atau 40 %, kualifikasi pendidikan SMP sebanyak 2 orang atau 1 % Kondisi pegawai dengan persentasi seperti tergambar diatas secara umum jika dilihat dari segi kuantitas masih kurang, namun dalam segi kualitas jumlah personil DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN sudah memadai dalam menunjang kinerja organisasi.

1.3.3. KONDISI RIIL PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA

Kebutuhan pegawai untuk tiap jenis jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada posisi jabatan struktural kebutuhan sebanyak 16 jabatan pada tahun 2018 jumlah jabatan terisi sebanyak 15 orang, sementara masih terdapat 1 jabatan yang belum terisi yakni jabatan eselon III.
2. Kebutuhan Jabatan fungsional umum DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN diasumsikan setiap eselon IV dibidang minimal memiliki staf sebanyak 2 orang dan setiap eselon IV di Sekretariat memiliki minimal 3 orang staf maka pegawai fungsional umum yang di perlukan adalah sebanyak 25 orang. Pada saat ini jabatan fungsional umum terisi sebanyak 9 orang, dengan demikian masih dibutuhkan sebanyak 16 orang.
3. Untuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan analisis kebutuhan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Kabupaten Banjar, pada instansi Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kab. Banjar dibutuhkan 29 orang pejabat fungsional Pranata komputer. Pada saat ini di Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten banjar terisi jabatan fungsional sebanyak 4 orang dengan rincian 1 orang Pranata Komputer Pertama , 1 orang Pranata Komputer Muda , 1 orang Pranata Komputer Terampil Lanjutan dan 1 orang Pranata komputer Terampil. Dengan demikian masih kekurangan fungsional Pranata komputer sebanyak 25 orang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian telah mengirim personil pada diklat yang dibutuhkan.

1.4 SARANA DAN PRASARANA

Tabel 1.4
Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja
DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Kabupaten Banjar Tahun 2018

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1.	Kendaraan roda 4	6	B
2.	Kendaraan roda 2	3	B
3.	Aula Rapat	1	B
4.	Printer	8	B
5.	Komputer	26	B
6.	Laptop	10	B
7.	Meja Kerja	30	B
8.	Kursi	30	B

Prasarana lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian adalah :

- Stasion SB Radio
- Ruang Media Center
- Command Center Barokah

1.5 KEUANGAN

Anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjar.

Rincian anggaran yang dikelola oleh DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN adalah seperti dijelaskan pada tabel Tabel I-4. sebagai beriku

Sumber Dana	Besar Anggaran (Rp)	Persentase (%)
APBD	14,030,290,900	

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/Manfaat LKj IP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi SKPD, Potensi yang menjadi ruang lingkup SKPD, dan Sistematika penulisan LKj IP.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian/Penetapan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang

telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangka mewujudkan janji-janji politik kepada masyarakat Banjar ketika proses pemelihan kepala daerah. Sebagai bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Banjar, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar berkewajiban menyusun RENSTRA guna mendukung program Bupati Banjar dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. RENSTRA DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN memuat Visi dan sebagian Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN, Juga memuat berbagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan menetapkan tujuan, sasaran program dan kegiatan yang disertai indikator target dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang.

2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH KABUPATEN BANJAR

Selanjutnya didalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Banjar yang merupakan upaya mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Banjar dalam lima tahun mendatang. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- ✓ Sejahtera; Sejahtera dalam pengertian ini adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.
- ✓ Barokah; Sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesehajteraan sosial.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Ditinjau dari urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Banjar, Dinas Kominfo, Statistik Dan Persandian berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Mencermati lima misi pembangunan daerah tersebut, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian berkontribusi pada misi Empat dan kelima dengan berfokus meningkatkan peran TIK menjadi unsur vital dalam menjalankan segala proses disegenap sektor penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.2 TUJUAN DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki.

Adapun tujuan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
2.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan	Terbangunnya Konektifitas data dan aplikasi layanan umum Pemerintahan

2.1.3 SASARAN DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan.

Adapun sasaran Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika
2.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan	Terwujudnya tata laksana Pemerintahan Daerah yang berkualitas

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dalam tabel terlampir.

Tabel 2.3
Sasaran Kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar
Banjar 2016-2021

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	kondisi Awal (2016) %	kondisi Akhir (2021) %
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler	%	17	100
2.	Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Yang Berkualitas	Persentase Pengguna Website Domain dan Subdomain SKPD	%	50	100
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti Melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi	%	0	100

2.1.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANJAR

Merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 2.3
Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan

No	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatkan cakupan layanan komunikasi dan informatika hingga keseluruh Kabupaten Banjar	Mendorong Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok informasi bagi masyarakat
2.	Mengembangkan Tata laksana Pemerintahan Daerah yang berkualitas	Pengembangan Bank Data

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target (%)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler	76.34
2.	Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Yang Berkualitas	Persentase Pengguna Website Domain dan Subdomain SKPD	80
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti Melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi	100

2.3 PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang ada dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar dalam rangka pencapaian sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Perubahan Anggaran Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	CAPAIAN TAHUN 2017	TARGET 2018	Target Triwulan	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler	%	113.15	76.34	I II III IV	76.34
2.	Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Yang Berkualitas	Persentase Pengguna Website Domain dan Subdomain SKPD	%	121.31	80	I II III IV	80.00
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti Melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi	%	100	100	I II III IV	100

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	6.245.670.200,-
2	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	329.300.000,-

3	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	14.000.000,-
4	Program kerjasama Informasi Dengan Mas Media	4.917.990.000,-
5	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	307.785.000,-

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	5,098,270,200
2	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	66,940,000
3	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	386,250,000
4	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	360,450,000
5	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	333,760,000
6	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	329,300,000
7	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	14,000,000
8	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	203,000,000
9	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4,051,900,000
10	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	663,090,000
11	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	163,675,000
12	Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah	144,110,000

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar pada tahun anggaran 2018 yang bersumber dari APBD sebesar Rp 16,874,456,976 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 2.844.166.076 (Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan Belanja Langsung Utama Rp 11.814.745.200 (Sebelas Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah), Belanja Langsung Pendukung Rp 2.215.545.700 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

2.4.1 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS.

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel II-6. Anggaran Belanja Langsung Per-Sasaran Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar Kab. Banjar Tahun 2018

NO	Sasaran Straregis	Anggaran	Persentase
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	5,432,030,200	38.72
2.	Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Yang Berkualitas	6.382.715.000	43.30

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam Bab II mengenai Rencana Kinerja Tahun 2018.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup ; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Atau

$$\text{Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar tahun 2018 yang telah

disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada table berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Nilai Realiasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam table berikut.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target nasional / SPM	Realisasi Tahun 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra 10=7/9
					TARGET	REALISASI	Capaian (Realisasi / Target) 8=7/6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan	Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler		80.34	76.34	92	120.51	100	92.00

	Informatika								
2.	Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Yang Berkualitas	Persentase Pengguna Website Domain dan Subdomain SKPD		88.23	80	100	125.00	100	100.0
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti Melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi		100	100	100	100.00	100	100.0
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (TOTAL CAPAIAN DI BAGI JUMLAH INDIKATOR)							115.17		

Dari Tabel diatas dapat dilihat Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten banjar memiliki dua sasaran.

Sasaran (1) : Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika. Untuk capaian kinerja pada Misi 4 (empat) Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Untuk Indikator Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler. Sasaran ini memiliki Realisasi kinerja sebesar 92 %, hal ini melampaui dari target yang ingin dicapai sebesar 76.34 % sehingga capaian yang diperoleh sebesar 120.51 %. Capaian tahun 2018 telah menyumbang 92 % terhadap target akhir renstra 2021, ini berarti termasuk dalam kriteria sangat tinggi.

Sasaran (2) : Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Yang Berkualitas. Untuk capaian kinerja pada Misi 5 (lima) Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian ada 2 (dua) indicator sasaran :

1. Persentase Pengguna Website Domain dan Subdomain SKPD, tahun 2018 realisasi indikator mencapai 100 % dari target 80 % sehingga capaian realisasi di tahun 2018 menjadi 125,00 % . Capaian ini telah menyumbang 100 % terhadap target akhir Renstra 2021, ini berarti termasuk dalam kriteria sangat tinggi.
2. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindak Lanjuti melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi, untuk tahun 2018 ini capaian kinerja 2018 masih sama dengan tahun 2017 yang lalu dikisaran 100 %, dari target yang tentukan 100 % terealisasi 100 % ini berarti juga termasuk dalam kriteria sangat tinggi.

2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

2.1 SASARAN MENINGKATNYA CAKUPAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tabel 3.2.1
Capaian Kinerja DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Tahun
2018 Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA	Target nasional / SPM	Realisasi Tahun 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra 10=7/9
				TARGET	REALISASI	Capaian (Realisasi / Target) 8=7/6		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler		80.34	76.34	92	120.51	100	92.00

Dari tabel diatas dapat dilihat Sasaran Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika dengan indikator Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler selama kurun waktu 1 (satu) tahun Kabupaten Banjar pada tahun 2018. Capaian tahun 2018 adalah 120.51 % dengan target 76.34 %, capaian realisasi adalah 92 % capaian pada tahun 2018 telah berhasil menyumbang 92.00 % dari target 100 % pada tahun 2021. Capaian Indikator kinerja berkaitan dengan cakupan layanan internet dan telepon seluler, dihitung berdasarkan cakupan jangkauan internet atau Telepon seluler pada desa-desa yang ada di Kabupaten Banjar. Dari 300 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Banjar, berdasarkan laporan dari Kantor Kecamatan sebagian besar sudah terjangkau oleh layanan telekomunikasi dengan kekuatan penerimaan sinyal yang bervariasi yaitu 276 desa/kelurahan. hanya terdapat 24 Desa yang Blankspot (tidak memiliki sinyal).

Berdasarkan data diatas, maka dengan memakai rumus diatas, tingkat capaian dalam cakupan layanan internet adalah

$$= \frac{276 \text{ desa/kel} \times 100}{300 \text{ desa/kel}} = 92 \%$$

2.2 SASARAN TERWUJUDNYA TATA LAKSANA PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS

Tabel 3.2.2

Capaian Kinerja DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Tahun 2018 Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA	Target nasional / SPM	Realisasi Tahun 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	Capaian Tahun n terhadap Target Akhir Renstra 10=7/9
				TARGET	REALISASI	Capaian (Realisasi / Target) 8=7/6		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Persentase Pengguna Website Domain dan Subdomain SKPD		88.23	80	100	125.00	100	100.0
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti Melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi		100	100	100	100.00	100	100.0

Adapun program dan kegiatan berikut mendukung capaian sasaran diatas, secara rinci sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.1

Capaian Program / Kegiatan DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN Tahun 2018 Sasaran 1

NO	Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra 10=7/9
			TARGET	REALISASI	Capaian (Realisasi / Target) 8=7/6		
1	2	3	6	7	8	9	10
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa - Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi	100	44 %	44 %	100	88 %	50.00
1.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi						

	- Jumlah website SKPD	72.7	33 SKPD	33 SKPD	100.00	33 SKPD	100.0
1.2	Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi						
	- Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kebijakan komunikasi dan informasi		1 Doc	1 Doc	100.00	1.00 Doc	100.0
	- Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek		5 org	5 org	100.00	5.00 org	100.0

Tabel diatas menunjukkan maka gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengukuran kinerja sasaran strategik dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Program cakupan infrastruktur komunikasi dan informatika dari target penetapan kinerja sebesar 44 %, dapat terealisasi 44 %, maka capaian kinerja adalah 100 %.capaian 2018 menyumbang 50 % dari capaian target akhir Renstra 88 % .Realisasi kinerja 44 % yaitu sebanyak 15 SKPD yang terhubung internet terpadu yang disewa oleh Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian dari jumlah seluruh SKPD sebanyak 34 SKPD.Keberhasilan pencapaian indikator program tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian program/kegiatan :

- Pengadaan jaringan broadband ke 15 SKPD Kabupaten Banjar
- Pembangunan Command Center
- Pengadaan dan Pembangunan ruang server
- Penyewaan ISP untuk dibagikan ke 15 SKPD

Berdasarkan target akhir Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Banjar, maka pada Tahun Anggaran 2021 seluruh SKPD di Kabupaten Banjar akan akan terintergrasi dalam satu jaringan broadband yang dikelola oleh Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian. Jaringan terpasang ini juga dapat digunakan sebagai intranet sehingga akan mempermudah komunikasi antar SKPD dalam satu jaringan.

Secara umum program ini akan dapat dicapai selama adanya komitmen pimpinan untuk membangun sistem pemerintahan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, sedangkan hambatan yang mungkin terjadi adalah keterbatasan sumber daya manusia baik berupa secara kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, Pemerintah daerah harus melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas ASN yang ada di Kabupaten Banjar dengan memberikan tugas belajar, pelatihan ataupun Bimtek yang berkaitan dengan TIK.

Tabel 3.2.2.1
 Capaian Program / Kegiatan DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN
 Tahun 2018 Sasaran 2

Adapun program dan kegiatan berikut mendukung capaian sasaran kedua, secara rinci sebagai berikut :

NO	Program / Kegiatan	Capaian Tahun 2017	2018			TARGET AKHIR RENSTRA	Capaian Tahun 2018 terhadap Target Akhir Renstra 10=7/9
			TARGET	REALISASI	Capaian (Realisasi / Target) 8=7/6		
1	2	3	6	7	8	9	10
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa (15) Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan - Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ditingkat kecamatan		50 %	50 %	100.00	50 %	100.0
1.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (15.03) - Jumlah sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dilaksanakan - Jumlah sosialisasi lapor		4 kali	4 kali	100.00	4 kali	100.0
			1 kali	1 kali	100.00	1 kali	100.0
1.2	Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (15.05) - Jumlah Peralatan Studio yang dibeli		39 unit	30 unit	76.92	39 unit	76.9
1.3	Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (15.06) - Jumlah sosialisasi PPID		1 kali	1 kali	100.00	39 kali	2.6
2	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi (16) - Persentase Pengkajian dan analisis Informasi dan Komunikasi		20 %	20 %	100.00	60 %	33.3
2.1	Kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi (16.01) - Jumlah laporan analisa kajian Trending Topik media		4 doc	4 doc	100.00	12 doc	33.3

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab. Banjar

3	<p>Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi (17)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Peningkatan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi 		30	%	30	%	100.00	100	%	30.0
3.1	<p>Kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi (17.01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pelatihan yang dilaksanakan 		1	kali	1	kali	100.00	4	kali	25.0
4	<p>Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media (18)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Jumlah Informasi yang terpublikasikan 		50	%	50	%	100.00	100	%	50.0
4.1	<p>Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (18.01)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah baleho yang dicetak - Jumlah spanduk yang dicetak - Jumlah brosur yang dicetak - Jumlah pameran / expo yang diikuti 		3000	m2	3000	m2	100.00	9,000	m2	33.3
			480	m2	480	m2	100.00	2,000	m2	24.0
			600	lbr	600	lbr	100.00	2,400	lbr	25.0
			1	kali	1	kali	100.00	4	kali	25.0
4.2	<p>Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (18.02)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah media yang bekerjasama - Jumlah Konfrensi Pers yang diselenggarakan - Jumlah surat kabar harian yang disebar 		30	media	30	media	100.00	30	media	100.0
			12	kali	12	kali	100.00	48	kali	25.0
			1080	eks	1080	eks	100.00	4,320	eks	25.0
4.3	<p>Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat (18.03)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Berita Pembangunan daerah yang ditayangkan lewat media TV milik daerah - Jumlah Berita Pembangunan daerah yang ditayangkan lewat media Radio milik daerah 		1027	berita	1027	berita	100.00	4,108	berita	25.0
			1050	berita	1050	berita	100.00	4,200	berita	25.0
5	<p>Program pengembangan Data/Informasi/Statistik daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Layanan item Data Statistik sektoral yang disajikan secara akurat 		33.3	%	33.3	%	100	100	%	33.3

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah								
- Jumlah Laporan data statistik sektoral daerah	1	doc	1	doc	100.00	4	doc	25.0
Kegiatan Pengelolaan updating dan Analisis Data statistik daerah								
- Jumlah laporan Analisis	1	doc	1	doc	100.00	4	doc	25.0

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar tahun 2018 adalah sebesar Rp 16,053,445,585 (95.13 %) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 2,659,832,785 (16.57 % dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp 13.393.612.800 (83.43 % dari total realisasi).

Realisasi anggaran belanja langsung untuk program utama sebesar Rp 11.385.557.448 (96.4% dari total anggaran yang dilokasikan untuk program utama sebesar Rp 11,814,745,200) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung program pendukung sebesar Rp 2,008,055,352 (90.6% total anggaran yang dilokasikan untuk program pendukung sebesar Rp 2,215,545,700), dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 2,659,832,785 (93.5 % dari total anggaran dari yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 2,844,166,076).

Tabel 3.4.1
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN % REALISASI)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN % REALISASI)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler	76.34	92	120.51	5,432,030,200	5,349,462,498	98.5

2.	Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Yang Berkualitas	Persentase Pengguna Website Domain dan Subdomain SKPD	80	100	125.00	4,917,990,000	4,677,477,840	95.1
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti Melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi	100	100	100.00	1.464.725.000	1,358,617,110	91.5
Total Belanja Langsung						11,814,745,200	11.385.557.448	96.4
Total Belanja Langsung Pendukung						2,215,545,700	2,008,055,352	90.6
Total Belanja Tidak Langsung						2,844,166,076	2,659,832,785	93.5

ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari dua sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak dua sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk **Sasaran Pertama**: Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika, dengan indikator Cakupan Layanan Internet dan telepon seluler telah mencapai kinerja sebanyak 120.51 % namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 98.5 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian **sasaran kedua** : Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Yang Berkualitas, pada indikator kinerja Persentase Pengguna Website Domain dan Subdomain SKPD dengan pencapaian kinerja sebanyak 125.00 %, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 95.1 %. Kemudian masih di sasaran yang sama pada indikator kinerja Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti Melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi pencapaian kinerja sebanyak 100 %, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 91.5 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.4.2
Efisien Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)=4-5
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Cakupan Layanan Internet dan Telepon Seluler	120.51	98.5	1.5
2.	Terwujudnya Tata Laksana Pemerintahan Yang Berkualitas	Persentase Pengguna Website Domain dan Subdomain SKPD	125.00	95.1	4.9
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindak Lanjuti Melalui Unit Pengaduan Masyarakat yang Terintegrasi	100.00	91.5	8.5

3.1 TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN (2017)

3.1.1. EVALUASI KINERJA TAHUN (2017)

Hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar Tahun 2017 memperoleh nilai **73.87** dengan interpretasi predikat BB. maka pada tahun 2018 direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan tujuan dan indikator Kinerja tujuan yang lebih berorientasi hasil ;
2. Hasil pengukuran kinerja agar dapat dijadikan dasar sistem Reward dan Punishment;

3. Meningkatkan Kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan bahwa perencanaan didahului dengan merencanakan kinerja (hasil), baru kemudian merencanakan kebutuhan anggaran. memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan Kinerja Utama dengan penganggarnya (mengaitkan indikator Kinerja utama dengan anggarannya);
4. Mengimplemtasikan / memanfaatkan hasil pengukuran dan pelaporan kinerja untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta penilaian dan peningkatan kinerja;

3.2. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian yang bertugas untuk melakukan monitoring secara berkala setiap triwulan terhadap target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Koordinasi mantap antara bidang terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Keberhasilan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya tercermin dari pencapaian sasaran strategis sesuai RPJMD dan Renstra Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar tahun 2016-2021. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Tahun 2018 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kepada masyarakat. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diharapkan pencapaian kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian tahun 2018 dengan kualitas pelaksanaan baik dari sebelumnya pada tahun 2017, sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik hingga tahun-tahun berikutnya.

2. SARAN-SARAN

Beberapa masalah yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian sebagaimana berikut :

1. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak, dan media luar ruang belum optimal.
2. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/gagap teknologi; dan adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara masyarakat yang tinggal di kota dan perdesaan, khususnya wilayah miskin/blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK);
3. Belum optimalnya SKPD yang memanfaatkan fasilitas hosting dan colocation di Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian sebagai penyedia layanan hosting dan colocation.

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah :

1. Melakukan koordinasi dan meningkatkan kerjasama yang baik dengan media elektronik (radio dan televisi) dalam pelaksanaan

penyebarluasan informasi melalui kegiatan dialog interaktif dan penerbitan/media cetak (surat kabar harian, tabloid, majalah, leaflet, brosur dll) serta media luar ruang (baliho, spanduk dan lain-lain).

2. Melakukan verifikasi, validasi data pengaduan, dan memfasilitasi jawaban ke SKPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Banjar perihal pengaduan masyarakat.
3. Menyediakan layanan TIK dan pemberdayaan masyarakat tentang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meminimalisasi masyarakat gagap teknologi, Workshop TIK, sosialisasi KIM (Kelompok informasi Masyarakat) di kabupaten Banjar.
4. Memberikan secara kontinyu bimbingan teknis pengelolaan website terhadap SKPD di Pemerintah kabupaten Banjar dan update data/informasi pada website www.banjarkab.go.id.
5. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan publik, standardisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik serta menyiapkan rencana dasar hukum tentang pedoman penyelenggaraan teknologi informasi/Master Plan di lingkungan SKPD melalui Peraturan Bupati Banjar.

Laporan Kinerja Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian kabupaten Banjar tahun 2018 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

1. PK.
2. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya.